

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran krusial bagi suatu negara karena menjadi indikator adanya peningkatan yang terus-menerus menuju kemajuan. Melalui pemantauan dan analisis pertumbuhan dari waktu ke waktu, pemerintah dapat menilai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan telah berjalan secara efektif sesuai dengan target yang telah dirumuskan. Adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat nantinya akan berdampak baik bagi negara tersebut seperti peningkatan pendapatan negara serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Peningkatan pendapatan dan peningkatan lapangan kerja tersebut pada hakikatnya memerlukan biaya atau dana yang tidak sedikit. Kebutuhan dana atau biaya tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satunya yaitu penanaman modal atau investasi. Adanya penanaman modal atau investasi membuat kedua belah pihak nantinya akan sama-sama diuntungkan. Pihak pemberi modal nantinya akan menerima laba sedangkan pihak pemerintah selaku penerima modal akan terbantu karena semakin banyak investor yang masuk. Oleh karena itu, pembangunan yang direncanakan akan semakin cepat dan merata.

Penanaman modal dapat dilakukan dari luar maupun dalam negeri itu sendiri. Pada tahun 2023, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi asing pada tahun 2023 tembus Rp 744 triliun atau 52,4% dari total realisasi. Realisasi ini meningkat *double digit* 13,7% (Nugroho, 2024).

Berdasarkan data tersebut, tingkat penerimaan investasi di Indonesia dapat dikatakan cukup baik untuk menghadapi ketidakpastian dunia yang nantinya akan dihadapi. BKPM juga menyampaikan bahwa secara porsi, realisasi investasi asing jauh lebih tinggi dibandingkan investasi dari dalam negeri. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sangat terbantu dengan adanya penanaman modal dari luar atau penanaman modal asing dibandingkan dengan penanaman modal dalam negeri. Adanya fenomena ini tidak serta merta bisa langsung dianggap ancaman bagi negara ini. Pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat membantu dalam pembangunan nasional harus terus ditingkatkan demi tercapainya Indonesia menjadi negara maju.

Pelaksanaan investasi atau penanaman modal tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berada dalam pengaturan serta pengawasan pemerintah. Meski demikian, peran pemerintah sebatas sebagai pengawas dan tidak turut campur secara mendalam terhadap aspek-aspek yang bersifat privat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal menyebutkan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanaman modal dapat dilakukan pada berbagai sektor salah satunya yaitu sektor perdagangan.

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling mendasar dan penting dalam pertumbuhan serta perkembangan suatu negara. Perdagangan, baik di dalam negeri maupun lintas negara, memungkinkan suatu negara untuk

mengakses barang dan jasa yang sulit atau kurang efisien diproduksi sendiri, sekaligus membuka peluang untuk memasarkan produk andalannya ke kancah internasional. Perdagangan internasional memberikan berbagai keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu manfaat langsungnya adalah memungkinkan negara untuk melakukan spesialisasi, yakni mengekspor komoditas unggulan yang diproduksi secara efisien dan menukarnya dengan barang dari negara lain yang dapat dihasilkan dengan biaya lebih rendah. (Wiwin, 2022). Aktivitas ini tidak hanya menciptakan aliran barang dan jasa, tetapi juga mendorong transfer teknologi, peningkatan standar hidup, serta diversifikasi ekonomi.

Dalam konteks globalisasi yang semakin mendalam, perdagangan internasional menjadi motor penggerak utama bagi ekonomi dunia. Negara-negara yang mampu memanfaatkan perdagangan internasional secara efektif biasanya menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ekspor yang kuat dapat meningkatkan cadangan devisa negara, sementara impor memungkinkan akses ke barang-barang dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas domestik. Namun, perdagangan internasional juga menuntut adanya kebijakan ekonomi yang stabil, infrastruktur yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompetitif agar dapat bersaing di pasar global.

Perdagangan bukan hanya tentang aliran barang dan jasa, tetapi juga tentang bagaimana negara mampu beradaptasi dalam lanskap ekonomi global yang dinamis. Kunci keberhasilan perdagangan terletak pada kemampuan negara untuk memanfaatkan peluang, mengatasi tantangan, dan menyesuaikan kebijakan agar selaras dengan perkembangan global. Dalam konteks ini, Indonesia perlu terus

meningkatkan daya saingnya di pasar global sambil memastikan bahwa keuntungan dari perdagangan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penanaman modal di sektor perdagangan merupakan salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Investasi di sektor ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produksi dan ekspor, tetapi juga berperan krusial dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rumondor (2017), hasil temuan menunjukkan bahwa perdagangan internasional, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, sektor pertanian, serta tingkat urbanisasi merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja di Indonesia. Peningkatan pada salah satu faktor tersebut, dengan asumsi faktor lainnya tetap, cenderung mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan dalam salah satu dari faktor-faktor tersebut akan berimplikasi langsung pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap, yang pada akhirnya mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, terdapat kekurangan dalam strategi pengelolaan dan optimalisasi investasi asing di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa investasi tersebut terdistribusi secara merata ke sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif guna mengintegrasikan pemerataan ke dalam perekonomian nasional dengan cara yang lebih strategis dan inklusif, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap volatilitas ekonomi global.

Lebih lanjut, pelaksanaan penanaman modal di sejumlah wilayah masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak besar terhadap minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Berdasarkan sejumlah referensi, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam kegiatan investasi, antara lain: perlunya pembenahan kebijakan serta pelaksanaan investasi, hambatan birokrasi, ketidakjelasan dalam interpretasi dan pelaksanaan otonomi daerah, kualitas sumber daya manusia serta isu dalam kebijakan ketenagakerjaan, tingginya tingkat korupsi, minimnya insentif baik fiskal maupun non-fiskal, serta lemahnya kepastian dan penegakan hukum. (Melisa et al., 2017).

Menurut Melisa (2017), di daerah Sabang mengalami tantangan dalam pelaksanaan penanaman modal yang cukup signifikan. Meskipun secara global Sabang memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran internasional, kenyataannya, kawasan ini masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Tantangan internal seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum memadai, ditambah dengan kondisi keamanan yang kurang stabil, menciptakan lingkungan yang kurang menarik bagi investor. Selain itu, hambatan lain seperti adaptasi terhadap kearifan lokal dan budaya masyarakat, serta kesulitan dalam aksesibilitas regional, semakin memperburuk situasi.

Hambatan terhadap proses penanaman modal menuntut intervensi kebijakan yang komprehensif, tidak hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Pemerintah perlu mengatasi ketidakselarasan antara potensi strategis kawasan dan kesiapan infrastrukturnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki infrastruktur dasar, serta menciptakan iklim investasi

yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung investasi harus diprioritaskan untuk menciptakan sinergi antara investor dan komunitas lokal.

Keseluruhan situasi ini menunjukkan bahwa penanaman modal di sektor perdagangan, meskipun memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian, menghadapi tantangan-tantangan struktural yang memerlukan pendekatan multi-dimensi. Integrasi perdagangan internasional dengan penguatan sektor domestik, pengelolaan investasi asing yang lebih baik, serta penanganan kendala-kendala regional seperti di Sabang, menjadi kunci untuk memastikan bahwa penanaman modal tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dibahas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal prosedur penanaman modal pada sektor perdagangan di DPMPTSP Kabupaten Pekalongan. Hal ini nantinya dapat menjadi tolak ukur baik atau tidaknya prosedur penanaman modal yang selama ini sudah dilakukan. Oleh karena itu, penulis, membuat tugas akhir ini yang diberi judul Prosedur Penanaman Modal Sektor Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, ruang lingkup penulisan yang akan dibahas adalah “Bagaimana perbedaan antara prosedur penanaman modal sektor perdagangan secara teori dan yang terjadi pada DPMPTSP Kab. Pekalongan

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara prosedur penanaman modal sektor perdagangan secara teori dan yang terjadi pada DPMPTSP Kab. Pekalongan.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini bagi mahasiswa, perusahaan, dan universitas diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi dalam program Diploma III Akuntansi di Fakultas Sekolah Vokasi Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro, serta sebagai kontribusi penelitian yang dapat mempertimbangkan hubungan antara teori-teori yang diajarkan selama kuliah dengan implementasinya dalam konteks perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi atau kinerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Bagi Universitas

Sebagai bahan literasi baru khususnya dalam hal prosedur penanaman modal serta sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi dengan pihak yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan dalam Tugas Akhir ini terbagi menjadi 4 diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penulisan

Tugas Akhir yang penulis buat ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini dilakukan untuk membantu penulis dalam menelaah efektivitas prosedur penanaman modal yang dilakukan pada DPMPTSP Kabupaten Pekalongan mulai dari proses perencanaan penanaman modal yang akan dilakukan sampai dengan hasil dari penanaman modal.

1.5.2 Tempat dan Waktu Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan di DPMPTSP Kabupaten Pekalongan yang berlokasi di Jl. Sindoro No. 9, Sumurbandung, Gejlig, Kec. Kajan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161 dan dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan dari 2 Januari sampai dengan 12 April 2024 sesuai dengan kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) yang dilakukan oleh penulis.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

Penulisan tugas akhir ini menggunakan data kualitatif yang berisi mengenai pendapat berdasarkan pengalaman atau kejadian yang telah terjadi. Penulis mengumpulkan data yang berupa data primer dan sekunder. Data

primer penulis dapatkan melalui wawancara terhadap Pegawai bagian Perizinan dan bagian Front Office di DPMPTSP Kabupaten Pekalongan yang dijadikan sebagai informan dalam penyusunan tugas akhir ini. Data sekunder penulis peroleh berdasarkan dokumen serta arsip yang berhubungan dengan prosedur penanaman modal di DPMPTSP Kabupaten Pekalongan

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu studi pustaka, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan penulis menggunakan bahan ajar di internet dan juga buku-buku di DPMPTSP. Teknik ini dilakukan untuk menambah wawasan mengenai prosedur penanaman modal yang nantinya digunakan sebagai landasan teori dan sumber data. Wawancara dilakukan kepada informan yang bertugas pada penyusunan prosedur penanaman modal di DPMPTSP Kabupaten Pekalongan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini terbagi menjadi empat bab yang terdiri atas:

Bab I : merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : merupakan gambaran umum perusahaan yang berisikan profil, struktur organisasi, dan budaya kinerja DPMPTSP Kabupaten Pekalongan.

Bab III : berisi pembahasan penelitian terdiri dari landasan teori, tinjauan praktik, dan perbedaan antara tinjauan teori dengan tinjauan praktik.

Bab IV : merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari penelitian atau analisis yang dilaksanakan.